

PEMANTAPAN KARAKTER SUATU BANGSA  
MELALUI PENDIDIKAN MENUJU MASYARAKAT EKONOMI  
ASEAN (MEA) 2015

Titik Setyowati  
titiktyowati@ut.ac.id  
UPBJJ-UT Surabaya

Abstrak

Masyarakat Indonesia masih bingung dengan identitas bangsanya. Sebagai contoh, jika kita bicara masalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila beserta pengamalannya, dinilai oleh pihak-pihak tertentu melestarikan doktrin Orde Baru yang terkenal dengan istilah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Demikian juga, seiring dengan perkembangan teknologi informasi melalui dunia maya, pada akhir-akhir ini banyak diperdebatkan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan kedudukan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan kita, sehingga perdebatan tersebut membingungkan masyarakat pada umumnya maupun masyarakat pendidikan pada khususnya. Pancasila sebagai dasar negara kita benar dan tidak perlu diperdebatkan, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila yang wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari juga benar, karena belum semua warga negara Indonesia mengamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, sebagai contoh masih banyaknya aparat pemerintah pada saat itu yang melanggar norma-norma umum yang berlaku di negara kita, seperti kasus korupsi, berbuat semena-mena terhadap kaum yang lemah, dan lain sebagainya. Masalah yang diajukan bagaimana cara memantapkan karakter suatu bangsa melalui pendidikan agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila dapat diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga perilaku kita mencerminkan identitas nasional, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan. Dengan demikian kita bangsa Indonesia memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi kompetisi perdagangan bebas di tingkat ASEAN. Tujuan penulisan ini memantapkan karakter bangsa Indonesia melalui pendidikan menuju masyarakat ekonomi ASEAN ( MEA ) 2015.

Nilai – nilai esensial yang terkandung dalam pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan, dalam kenyataannya telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum terbentuk

negara, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut sudah diyakini kebenarannya dan merupakan jiwa dan kepribadian bangsa kita. Untuk itu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut tidak hanya dipahami secara teori, namun perlu diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari oleh semua masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pendidikan pada khususnya melalui jalur pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan formal, in-formal, maupun non-formal. Pada tahap ini aspek-aspek yang dikembangkan dalam pendidikan tidak hanya mengagungkan wilayah kognisi, melainkan keterpaduan antara kognisi, afeksi dan psikomotor, sehingga suatu saat anak-anak kita menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan dan membawa citra negara kita menjadi negara yang lebih bermartabat di kancah internasional. Kualitas suatu pendidikan dapat dilihat dari output yang dihasilkan, melalui proses belajar mengajar serta sarana dan prasarannya. Bukan hanya kesabaran dan keikhlasan yang harus lebih ditunjukkan oleh para pendidik, tetapi pendidikan nilai dan moral agama dan penerapan budi pekerti luhur serta keteladanan pendidik/orang tua menampilkan akhlaq yang mulia harus lebih diintensifkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah sebagai lembaga formal pendidikan. Melalui pendidikan yang berkualitas, kita berharap dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal, yang mampu memenangkan persaingan di kancah percaturan internasional menuju MEA 2015. Semua itu dapat kita raih jika kita memiliki komitmen untuk membekali sumber daya manusia itu dengan bekal pendidikan nilai dan moral beragama yang diawali dari rumah dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, budaya yang melekat, dan nilai-nilai kebangsaan sebagai hasil dari perjuangan bangsa kita.

Kata-kata kunci: karakter bangsa, pendidikan, MEA 2015

## **PENDAHULUAN**

Karakter suatu bangsa yang saat ini dikenal dengan istilah identitas nasional pada hakikatnya merupakan nilai – nilai budaya yang tumbuh dan berkembang di dalam aspek kehidupan suatu bangsa. Karakter suatu bangsa berarti ciri – ciri, sifat khas yang melekat pada suatu bangsa sehingga menunjukkan suatu keunikan serta membedakan dengan bangsa lain. Sedangkan nasional berasal dari kata *nation* memiliki arti bangsa yang menunjukkan kesatuan komunitas sosio-kultural serta memiliki semangat, cita – cita, tujuan, dan ideologi bersama.

Untuk melestarikan identitas bangsa Indonesia adalah selalu menjunjung tinggi nilai – nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, Undang-undang dasar 1945, Bhineka Tunggal Ika dan dan tidak meninggalkan sejarah perjuangan

bangsa Indonesia. Pelestarian identitas nasional, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan Indonesiadapat memunculkan rasa kebangsaan (nasionalisme), dan semangat kebangsaan (patriotisme) yang sangat diperlukan untuk membangun serta memantapkan persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam berita hukum online (Senin, 17 Pebruari 2014), MPR menegaskan empat pilar kebangsaan sebagai hal sangat mendasar dan esensial dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Keempat pilar itu eksplisit sesuai dengan kedudukannya masing-masing. Misalnya, Pancasila sebagai dasar/ideologi negara, UUD 1945 sebagai konstitusi, NKRI sebagai bentuk negara, Bhinneka Tunggal Ika sebagai semangat pemersatu bangsa.

Menurut Wakil Ketua MPR, Lukman Hakim Saifuddin pada saat memberi keterangan dalam sidang lanjutan pengujian Pasal 34 ayat (3b) UU No 2 Tahun 2011 tentang tentang Perubahan atas UU No 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (UU Parpol) di ruang sidang utama MK, Senin (17/2) bahwa keberadaan pilar kebangsaan tidak mereduksi (mengubah) kedudukan Pancasila sebagai dasar/ideologi negara, namun dimaknai sebagai hal pokok, mendasar, dan esensial yang memiliki sifat dinamis. “Jadi sama sekali tidak menyamakan kedudukan Pancasila dengan pilar-pilar lain, apalagi mereduksi kedudukan Pancasila sebagai dasar negara yang dijamin dalam Pembukaan UUD 1945,” tegasnya. MPR mengingatkan mendalami empat pilar ini dalam rangka internalisasi dan reaktualisasi nilai-nilai dalam berbagai dimensi kehidupan berbangsa dan bernegara.

Mengapa selama ini masyarakat Indonesia masih bingung dengan identitas bangsanya. Sebagai contoh, jika kita bicara masalah nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila beserta pengamalannya, dinilai oleh pihak-pihak tertentu melestarikan doktrin Orde Baru yang terkenal dengan istilah Pedoman Penghayatan dan Pengamalan Pancasila (P4). Demikian juga, seiring dengan perkembangan teknologi informasi melalui dunia maya, pada akhir-akhir ini banyak diperdebatkan mengenai kedudukan Pancasila sebagai dasar negara dengan kedudukan Pancasila sebagai salah satu pilar kebangsaan

kita, sehingga membingungkan masyarakat baik masyarakat pada umumnya maupun masyarakat pendidikan pada khususnya.

Pancasila sebagai dasar negara kita benar dan tidak perlu diperdebatkan, nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila yang wajib diamalkan dalam kehidupan sehari-hari juga benar, karena belum semua warga negara Indonesia mengamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari, sebagai contoh masih banyaknya aparat pemerintah pada saat itu yang melanggar norma-norma umum yang berlaku di negara kita, seperti kasus korupsi, berbuat semena-mena terhadap kaum yang lemah, dan lain sebagainya.

Yang perlu kita pikirkan pada saat ini yaitu bagaimana agar nilai-nilai luhur yang terkandung dalam kelima sila dari Pancasila tersebut diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari sehingga identitas nasional, budaya, dan nilai-nilai kebangsaan kita tetap menyatu dalam jiwa dan kepribadian bangsa Indonesia dan sebagai pandangan hidup dalam segala aspek kehidupan, yang kita yakini kebenarannya dan pengamalannya bebas dari unsur politik dan didukung oleh semua pihak termasuk Pemerintah. Dengan demikian kita bangsa Indonesia memiliki karakter yang kuat dalam menghadapi kompetisi perdagangan bebas di tingkat ASEAN.

### **Sejarah Budaya Bangsa sebagai Akar Identitas Nasional.**

Bangsa Indonesia terbentuk melalui suatu proses sejarah yang cukup panjang yaitu sejak zaman kerajaan – kerajaan Kutai pada abad ke empat , kemudian dasar – dasar kebangsaan mulai timbul yaitu ketika timbulnya kerajaan Sriwijaya di Palembang pada abad ke tujuh, kemudian kerajaan Majapahit di Jawa Timur. Proses terbentuknya nasionalisme yang berakar pada budaya kita dirintis oleh para pejuang kemerdekaan Indonesia: angkatan 1908, angkatan sumpah pemuda 1928, dan akhirnya dicetuskan kemerdekaan RI pada tahun 1945. Oleh karena itu, akar nasionalisme Indonesia yang berkembang dalam perspektif sejarah sekaligus juga merupakan unsur dari identitas nasional. Adapun nilai – nilai esensial yang terkandung dalam Pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan dalam kenyataannya telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum terbentuk negara.

Nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila sudah kita yakini kebenarannya dan kelima sila dari Pancasila tersebut sebagai jiwa dan kepribadian bangsa kita yang merupakan falsafah hidup bangsa kita, sehingga semua aspek kehidupan baik dalam kehidupan berbangsa dan bernegara mengacu pada falsafah negara kita.

Kita sebagai bangsa Indonesia juga harus memahami moto nasional kita yakni “Bhineka Tunggal Ika” atau “kesatuan dalam keragaman”. Hal ini diciptakan oleh para pemimpin publik yang diproklamasikan pada tahun 1945 dan tantangan politik selama lebih dari 65 tahun yang lalu, karena meskipun setengah abad lebih menjadi bagian dari Indonesia yang merdeka telah menimbulkan perasaan yang kuat tentang identitas nasional di lebih dari 13.000 pulau – pulau yang membentuk kepulauan yang dinamakan negara Indonesia.

Patriotisme adalah suatu tindakan rela berkorban dalam membela negara melalui profesinya masing-masing. Sikap Patriotisme dapat diwujudkan dengan cara: (1) menempatkan kepentingan bangsa dan negara di atas kepentingan pribadi atau golongan; (2) membina persatuan dan kesatuan bangsanya; (3) menjaga nama baik bangsa dan negara di mata dunia; (4) berani minta maaf dan memaafkan; (5) belajar dengan sungguh – sungguh.

Secara luas nasionalisme menyatakan patriotisme yang merupakan prinsip moral dan mengandung kecintaan seseorang terhadap negaranya. Hal ini dapat diaplikasikan pada kurikulum setiap lembaga pendidikan baik formal, informal, maupun non-formal melalui mata pelajaran/bidang studi yang relevan.

Lahirnya identitas nasional suatu bangsa tidak dapat di lepaskan dari dukungan *faktor objektif* , yaitu faktor – faktor yang berhubungan dengan geografis-ekologis dan demografis, dan *faktor subjektif* yaitu faktor – faktor histories, politik, sosial, dan kebudayaan yang dimiliki bangsa tersebut.

Kondisi geografis-ekologis yang membentuk Indonesia sebagai daerah kepulauan yang beriklim tropis dan terletak di persimpangan jalan komunikasi antar wilayah dunia di Asia Tenggara ikut mempengaruhi perkembangan kehidupan demografis, ekonomis, sosial, dan kultural bangsa Indonesia. Selain itu, *faktor historis* yang dimiliki Indonesia ikut mempengaruhi proses

pembentukan masyarakat dan bangsa Indonesia beserta identitasnya, melalui interaksi dari berbagai faktor yang ada di dalamnya, hasil interaksi tersebut melahirkan proses pembentukan masyarakat, bangsa, dan negara beserta identitas bangsa Indonesia.

### **Nilai – Nilai yang dapat Merusak Kepribadian Bangsa**

Adapun beberapa nilai – nilai yang tidak sesuai atau berlebihan yang dapat merusak kepribadian bangsa yang harus kita tolak, misalnya : (1) sekularisme, yaitu paham atau pandangan falsafah yang berpendirian bahwa moralitas tidak perlu didasarkan pada ajaran agama; (2) individualisme, yaitu sikap yang mementingkan kepentingan sendiri; (3) hedonisme, yaitu paham yang melihat bahwa kesenangan atau kenikmatan menjadi tujuan hidup dan tindakan manusia; (4) materialisme, yaitu sikap yang selalu mengutamakan dan mengukur segala sesuatu berdasarkan materi, dan hubungan batiniah tidak lagi menjadi bahan pertimbangan dalam hubungan antar manusia; (5) ekstremisme, yaitu pikiran atau tindakan seseorang yang melampaui batas kebiasaan atau norma – norma yang ada dan berlaku di suatu tempat; (6) chauvinisme, yaitu paham yang mengagung – agungkan bangsa sendiri dan merendahkan bangsa lain; (7) elitisme, yaitu sikap yang cenderung bergaya hidup berbeda dengan rakyat kebanyakan; (8) konsumenisme, yaitu paham atau gaya hidup menganggap barang – barang sebagai ukuran kebahagiaan dan kesenangan; (9) diskriminatif, yaitu sifat seseorang yang suka membeda – bedakan antar yang satu dengan lainnya; (10) glamoristik, yaitu sikap atau gaya hidup suka menonjolkan kemewahan.

### **Pancasila sebagai Pandangan Hidup Bangsa**

Pancasila adalah pandangan hidup yang berintikan keyakinan bahwa manusia itu diciptakan dalam kebersamaan dengan sesamanya. Keberadaan masyarakat dalam Pancasila adalah suatu kodrat manusia. “Pandangan hidup Pancasila ini disebut filsafat kekeluargaan, pandangan yang melihat tiap manusia itu adalah warga atau anggota dari suatu kesatuan, rumah tangga, keluarga besar, komunitas yang lebih besar, bangsa, umat manusia, yang di dalam kesatuannya itu kepribadiannya diakui, dihormati, dan dilindungi oleh kesatuannya dan oleh

sesamanya, dan sebaliknya tiap warga kelompok itu merasa bertanggungjawab untuk berpartisipasi memelihara keutuhan dan kesejahteraan kelompok atau kesatuannya”, Kata Guru Besar Fakultas Ilmu Hukum ini.

Pancasila berintikan asas Bhinneka Tunggal Ika yang berarti ‘berbeda-beda itu satu, yang satu itu berbeda-beda’. Bernard Arief Sidharta mengutip pendapat Soediman Kartohadiprodo yang menyatakan itu sebagai ‘kesatuan dalam perbedaan dan perbedaan dalam kesatuan’. Pendapat ahli hukum Soediman Kartohadiprodo tentang Bhinneka Tunggal Ika itu diartikan sebagai perwujudan asas keberadaan alam semesta dengan segala isinya dan setiap hal adalah bagian dari suatu kesatuan yang lebih besar, dan tiap hal selalu terdiri atas sejumlah bagian, dan di dalam kesatuannya itu tiap bagian mempunyai kedudukan dan fungsi khas. Bhinneka Tunggal Ika menjadi benang merah yang mempersatukan setiap sila dari Pancasila menjadi suatu kesatuan yang utuh (Penulis: Ignatius Dwiana).

### **Peranan Pendidikan dalam melestarikan Identitas Nasional, Budaya, dan Nilai-nilai Kebangsaan**

Pendidikan memiliki peranan yang sangat penting bagi kehidupan manusia. Pendidikan dapat mempengaruhi perkembangan manusia dalam seluruh aspek kepribadian dan kehidupannya. Pendidikan memiliki kekuatan (pengaruh) yang dinamis dalam menyipkan kehidupan manusia di masa depan. Pendidikan dapat mengembangkan berbagai potensi yang dimilikinya secara optimal, yaitu pengembangan potensi individu yang setinggi-tingginya dalam aspek fisik, intelektual, emosional, sosial dan spiritual, sesuai dengan tahap perkembangan serta karakteristik lingkungan fisik dan sosio-budaya dimana ia hidup.

Pendukung utama bagi tercapainya sasaran pembangunan manusia Indonesia yang bermutu adalah pendidikan yang bermutu. Pendidikan yang bermutu dalam penyelenggaraannya tidak cukup hanya dilakukan melalui transformasi ilmu pengetahuan dan teknologi, tetapi harus didukung oleh peningkatan profesionalisasi dan sistem manajemen tenaga kependidikan serta

pengembangan kemampuan peserta didik untuk menolong diri sendiri dalam memilih dan mengambil keputusan demi pencapaian cita-citanya.

Dalam dunia pendidikan dikenal tiga pilar yakni manajemen dan supervisi, pengajaran, dan bimbingan konseling. Hubungan ketiga pilar tersebut sudah diatur dalam kurikulum pendidikan (Nurihsan, Juntika Ahmad, 2012).

Pendidikan merupakan aset yang tak ternilai bagi individu dan masyarakat. Pendidikan merupakan proses yang esensial untuk mencapai tujuan dan cita-cita pribadi individu. Secara filosofis dan historis pendidikan menggambarkan suatu proses yang melibatkan berbagai faktor dalam upaya mencapai kehidupan yang bermakna baik bagi individu sendiri maupun masyarakat pada umumnya.

### **Harapan terhadap Pendidikan.**

Para peserta didik memandang sekolah sebagai lembaga yang dapat mewujudkan cita-cita mereka. Sementara orang tua menaruh harapan kepada sekolah untuk mendidik anak agar menjadi orang yang pintar, terampil, dan berahlak mulia. Apayang diharapkan dari pendidikan untuk perkembangan peserta didik, setiap negara atau bangsa memiliki orientasi dan tujuan yang relatif berbeda. Bagi kita bangsa Indonesia, kontribusi pendidikan yang diharapkan bagi perkembangan para peserta didik sesuai dengan tujuan pendidikan nasional kita (Undang-undang SPN No. 20/2003 Bab. II Pasal 3).

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut menunjukkan karakter pribadi peserta didik yang diharapkan terbentuk melalui pendidikan. Klausul undang-undang ini memberikan implikasi imperatif terhadap semua penyelenggaraan pendidikan, baik formal, in-formal maupun non-formal agar senantiasa mengorientasikan programnya untuk membangun karakter (*character building*) peserta didik yang mempunyai ciri-ciri pribadi seperti tercantum dalam tujuan pendidikan nasional tersebut (Yusuf, Syamsu; Nurihsan, Juntika, 2012).

### **Bangsa Indonesia menuju Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015**

Perkembangan masyarakat yang semakin cepat sebagai akibat dari globalisasi dan pesatnya kemajuan teknologi komunikasi dan informasi membutuhkan penyesuaian tata nilai dan perilaku. Dalam suasana dinamis

tersebut, pengembangan kebudayaan diharapkan dapat memberikan arah bagi perwujudan identitas nasional yang sesuai dengan nilai-nilai luhur budaya bangsa. Di samping itu pengembangan kebudayaan dimaksudkan untuk menciptakan iklim kondusif dan harmonis sehingga nilai-nilai kearifan lokal akan mampu merespon modernisasi secara positif dan produktif sejalan dengan nilai-nilai kebangsaan.

Karakter suatu bangsa Indonesia merupakan cerminan dari identitas nasional dari bangsa itu sendiri. Untuk mengantisipasi perkembangan globalisasi ekonomi tingkat ASEAN, Indonesia merupakan salah satu negara anggota ASEAN, yang memiliki komitmen untuk menjalin komunitas ekonomi di tingkat ASEAN. Sejalan dengan itu para pemimpin juga sepakat untuk mempercepat pembentukan Komunitas Ekonomi ASEAN pada akhir tahun 2015. Tujuan terbentuknya komunitas ekonomi ASEAN dan untuk mengubah ASEAN menjadi daerah dengan perdagangan bebas barang, jasa, investasi, tenaga kerja terampil, dan aliran modal yang lebih bebas.

Masyarakat Ekonomi Asean (MEA ) adalah bentuk integrasi ekonomi ASEAN dalam artian adanya system perdagangan bebas antara Negara-negara ASEAN.Indonesia dan sembilan negara anggota ASEAN lainnya telah menyepakati perjanjian Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) atau ASEAN Economic Community (AEC). Bentuk Kerjasamanya adalah : (1) pengembangan sumber daya manusia dan peningkatan kapasitas; (2) pengakuan kualifikasi profesional; (3) konsultasi lebih dekat pada kebijakan makro ekonomi dan keuangan; (4) langkah-langkah pembiayaan perdagangan; (5) meningkatkan infrastruktur; (6) pengembangan transaksi elektronik melalui e-ASEAN; (7) mengintegrasikan industri di seluruh wilayah untuk mempromosikan sumber daerah; (8) meningkatkan keterlibatan sektor swasta untuk membangun Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA).

### **Pengembangan Sumber Daya Manusia dalam Menghadapi MEA 2015**

Sementara itu untuk pengembangan sumber daya manusia, pendidikan yang ada di Indonesia tergolong masih sangat memprihatinkan. Menyoroti

ranking Indonesia untuk *critical thinking* dan *problem solving* di antara Negara Asia yang ternyata ada di peringkat hampir buntut. Selain itu juga melihat ada ratusan lembaga yang memberikan sertifikasi di Indonesia dengan mudah, padahal □ mereka sebenarnya masih belum layak. Pemerintah seharusnya maju untuk memperbaiki sistem sertifikasi ini. Integrasi regional ini harus dilihat sebagai upaya untuk membuat Indonesia bisa terus berkompetisi dan inovatif. Tanpa adanya perjanjian perdagangan pun, pengusaha harus terus berusaha kompetitif. Integrasi regional ini akan memberi kerangka standard yang harus dicapai, membuat seperti apa standard Asia. Pada akhirnya meningkatkan kepercayaan diri UKM. Indonesia mempunyai pasar terbesar dan sebagai pengusaha kita tentu paling mengerti pasar ini. Indonesia telah siap untuk menghadapi MEA, hal ini ditandai oleh upaya pemerintah, para pelaku bisnis dan usaha, para masyarakat secara keseluruhan telah melakukan upaya perbaikan guna menhadapi kompetisi dengan negara-negara ASEAN. Masyarakat Ekonomi Asean (MEA) sudah ada di depan mata. Rencananya di akhir tahun 2015 MEA akan resmi dimulai. Secara bertahap, Asean sepakat untuk menghilangkan semua peraturan non tariff barrier dan mengimplementasikannya secara menyeluruh di tahun 2020.

### **Pendidikan Nilai sebagai Keniscayaan bagi Anak Bangsa.**

Ketentuan umum Undang-undang No 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS point 2 menyebutkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang berdasarkan Pancasila dan UUD Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Selain itu, dalam Bab II Pasal 3 disebutkan pula bahwa Pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Adanya kata-kata beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab dalam tujuan pendidikan nasional di atas menandakan bahwa yang menjadi bahan dalam praktek pendidikan hendaknya berbasis kepada seperangkat nilai sebagai paduan antara ranah kognitif, afektif dan psikomotor. Bahkan, tujuan pendidikan nasional yang utama menekankan pada aspek keimanan dan ketakwaan. Hal tersebut mengisyaratkan bahwa core value pembangunan karakter moral bangsa bersumber dari keyakinan beragama. Artinya, semua proses pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama yang diyakininya.

Praktek pendidikan pada jalur formal dewasa ini justru cenderung kurang memperhatikan esensi dari tujuan pendidikan nasional di atas, hal ini terbukti dengan kurang memadukannya nilai-nilai ketuhanan dalam proses pembelajaran yang dilaksanakannya, ironisnya justru lebih banyak berorientasi kepada pengembangan struktur kognitif semata. Fenomena tersebut tentunya sangat bertentangan dan membuat jarak antara tujuan dan hasil pendidikan nasional semakin jauh.

Berbagai fenomena sebagaimana disebutkan pada bagian pendahuluan, serta kenyataan semakin menggelindingnya proses dekadensi moral dikalangan generasi bangsa, semakin menunjukkan bahwa praktek pendidikan dewasa ini tidak bersandar kepada amanah undang-undang yang mengisyaratkan pendidikan yang berbasis kepada seperangkat nilai (baca: pendidikan nilai), serta semakin penting dan mendesaknya pendidikan nilai.

Pendidikan nilai merupakan proses penanaman dan pengembangan nilai-nilai pada diri seseorang. Dalam pengertian yang hampir sama, Mardiatmadja dalam Mulyana (2004:119) mendefinisikan pendidikan nilai sebagai bantuan terhadap peserta didik agar menyadari dan mengalami nilai-nilai serta menempatkannya secara integral dalam keseluruhan hidupnya. Pendidikan nilai tidak hanya merupakan program khusus yang diajarkan melalui sejumlah mata pelajaran, akan tetapi mencakup keseluruhan program pendidikan.

Minimal terdapat empat faktor yang mendukung pendidikan nilai dalam proses pembelajaran berdasarkan UU Sistem Pendidikan Nasional (UUSPN) Nomor 20 tahun 2003:

Pertama, UUSPN No. 20 Tahun 2003 yang bercirikan desentralistik menunjukkan bahwa pengembangan nilai-nilai kemanusiaan terutama yang dikembangkan melalui demokratisasi pendidikan menjadi hal utama. Desentralisasi tidak hanya dimaknai sebagai pelimpahan wewenang pengelolaan pendidikan pada tingkat daerah atau sekolah, tetapi sebagai upaya pengembangan dan pemberdayaan nilai secara otonom bagi para pelaku pendidikan.

Kedua, tujuan pendidikan nasional yang utama menekankan pada aspek keimanan dan ketaqwaan. Ini mengisyaratkan bahwa core value pembangunan karakter moral bangsa bersumber dari keyakinan beragama. Artinya bahwa semua proses pendidikan harus bermuara pada penguatan nilai-nilai ketuhanan sesuai dengan keyakinan agama yang diyakini.

Ketiga, disebutkannya kurikulum berbasis kompetensi (KBK) pada UUSPN No. 20 Tahun 2003 menandakan bahwa nilai-nilai kehidupan peserta didik perlu dikembangkan sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan belajar mereka. Kebutuhan dan kemampuan peserta didik hanya dapat dipenuhi kalau proses pembelajaran menjamin tumbuhnya perbedaan individu. Oleh karena itu, pendidikan dituntut mampu mengembangkan tindakan-tindakan edukatif yang deskriptif, kontekstual dan bermakna.

Keempat, perhatian UUSPN No. 20 Tahun 2003 terhadap usia dini (PAUD) memiliki misi nilai yang amat penting bagi perkembangan anak. Walaupun persepsi nilai dalam pemahaman anak belum sedalam pemahaman orang dewasa, namun benih-benih untuk mempersepsi dan mengapresiasi dapat ditumbuhkan pada usia dini. Usia dini adalah masa pertumbuhan nilai yang amat penting karena usia dini merupakan golden age. Di usia ini anak perlu dilatih untuk melibatkan pikiran, perasaan, dan tindakan seperti menyanyi, bermain, menulis, dan menggambar agar pada diri mereka tumbuh nilai-nilai kejujuran, keadilan, kasih sayang, toleransi, keindahan, dan tanggung jawab dalam pemahaman nilai menurut kemampuan mereka.

Dari berbagai pendekatan yang dapat digunakan dalam praktek pendidikan nilai, pendekatan penanaman nilai (inculcation approach) merupakan pendekatan yang paling tepat digunakan dalam pelaksanaan pendidikan nilai di Indonesia. Walaupun pendekatan ini dikritik sebagai pendekatan indoktrinatif oleh penganut filsafat liberal. Namun, berdasarkan kepada nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan falsafah Pancasila, pendekatan ini dipandang paling sesuai. Alasan-alasan untuk mendukung pandangan ini antara lain sebagai berikut.

1) Tujuan pendidikan nilai adalah penanaman nilai-nilai tertentu dalam diri siswa. Pengajarannya bertitik tolak dari nilai-nilai sosial tertentu, yakni nilai-nilai Pancasila dan nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia lainnya, yang tumbuh dan berkembang dalam masyarakat Indonesia.

2) Menurut nilai-nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan pandangan hidup Pancasila, manusia memiliki berbagai hak dan kewajiban dalam hidupnya. Setiap hak senantiasa disertai dengan kewajiban, misalnya: hak sebagai pembeli, disertai kewajiban sebagai pembeli terhadap penjual; hak sebagai anak, disertai dengan kewajiban sebagai anak terhadap orang tua; hak sebagai pegawai negeri, disertai kewajiban sebagai pegawai negeri terhadap masyarakat dan negara; dan sebagainya. Dalam rangka pendidikan nilai, siswa perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajibannya, supaya menyadari dan dapat melaksanakan hak dan kewajiban tersebut dengan sebaik-baiknya.

3) Menurut konsep Pancasila, hakikat manusia adalah makhluk Tuhan Yang Maha Esa, makhluk sosial, dan makhluk individu. Sehubungan dengan hakikatnya itu, manusia memiliki hak dan kewajiban asasi, sebagai hak dan kewajiban dasar yang melekat eksistensi kemanusiaannya itu. Hak dan kewajiban asasi tersebut juga dihargai secara berimbang. Dalam rangka pendidikan nilai, siswa juga perlu diperkenalkan dengan hak dan kewajiban asasinya sebagai manusia.

4) Dalam pengajaran nilai di Indonesia, faktor isi atau nilai merupakan hal yang amat penting. Dalam hal ini berbeda dengan pendidikan moral dalam masyarakat liberal, yang hanya mementingkan proses atau keterampilan dalam

membuat pertimbangan moral. Pengajaran nilai menurut pandangan tersebut adalah suatu indoktrinasi yang harus dihindari. Anak harus diberikan kebebasan untuk memilih dan menentukan nilainya sendiri. Pandangan ini berbeda dengan falsafah Pancasila dan budaya luhur bangsa Indonesia, yang percaya kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misalnya, berzina, berjudi, adalah perbuatan tercela yang harus dihindari; orang tua harus dihormati, dan sebagainya. Nilai-nilai ini harus diajarkan kepada anak, sebagai pedoman tingkah laku dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, dalam pengajaran nilai faktor isi nilai dan proses, keduanya sama-sama penting.

Salah satu komponen terpenting dalam pendidikan adalah tujuan pendidikan, tujuan pendidikan dapat diartikan sebagai hasil-hasil yang dicita-citakan dari tindakan pendidikan. Tujuan pendidikan harus diarahkan kepada pengembangan tiga dimensi yang dimiliki oleh manusia yaitu dimensi fisik, mental dan spiritual. Dimensi fisik lebih ditandai dengan ketercapaian kemampuan dan sikap yang menjadikan manusia sehat dan kuat. Sedangkan mental berhubungan dengan pengembangan intelegensia atau kecerdasan intelektual. Sementara dimensi spiritual yaitu mengarah kepada perwujudan kualitas kepribadian yang bersifat ruhaniah dalam bentuk tingkah laku, akhlak, dan moralitas yang mencerminkan kualitas kepribadian. Ketiga dimensi tersebut harus dicapai secara terintegrasi dan merupakan satu kesatuan yang akan membentuk kepribadian untuk mencapai manusia yang unggul (Human Excellence).

Namun, pada kenyataannya harus diakui bahwa pendidikan yang berlangsung saat ini belum dapat mewujudkan ketiga dimensi/aspek di atas dengan seimbang dan proporsional. Salah satu penyebabnya adalah penyelenggaraan pendidikan lebih menitikberatkan pada aspek intelektual dan kurang menyentuh aspek spritual. Karena itu output pendidikan sebagian besar hanya menampilkan performance intelektual, sementara tampilan sikap dan perilaku terpujinya sangat mengkhawatirkan. Oleh karena itu, dalam rangka membentuk keseimbangan ketiga aspek tersebut pada anak didik, pendidikan

mesti melakukan transfer of knowledge sekaligus transformation and internalization of value.

Dalam kaitannya dengan upaya mewujudkan tujuan pendidikan yang terfokus pada aspek spritual, pendidikan nilai merupakan salah satu upaya untuk mengembangkan aspek spiritual. Melalui pembelajaran di lembaga-lembaga formal ataupun informal pendidikan nilai dipandang sangat perlu dan penting untuk diterapkan, mengingat semakin maraknya perilaku-perilaku buruk di kalangan remaja maupun anak-anak sekarang yang membuat tanggung jawab sebagai orang tua maupun pendidik semakin berat. Bukan hanya kesabaran dan keikhlasan yang harus lebih ditunjukkan oleh para guru maupun pun orang tua, tetapi pendidikan agama dan penerapan budi pekerti luhur serta keteladanan orang tua menampilkan akhlaq yang mulia harus lebih diintensifkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah sebagai lembaga formal pendidikan.

## **PENUTUP**

Nilai – nilai esensial yang terkandung dalam pancasila yaitu: Ketuhanan, Kemanusiaan, Persatuan, Kerakyatan dan keadilan, dalam kenyataannya telah dimiliki bangsa Indonesia sejak zaman dahulu kala sebelum terbentuk negara, dan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut sudah diyakini kebenarannya dan merupakan jiwa dan kepribadian bangsa kita.

Untuk itu nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila tersebut tidak hanya dipahami secara teori, namun perlu diamalkan dalam kehidupan nyata sehari-hari oleh semua masyarakat Indonesia pada umumnya dan masyarakat pendidikan pada khususnya melalui jalur pendidikan yang dituangkan dalam kurikulum pendidikan formal, in-formal, maupun non-formal. Pada tahap ini aspek-aspek yang dikembangkan dalam pendidikan tidak hanya mengagungkan wilayah kognisi, melainkan keterpaduan antara kognisi, afeksi dan psikomotor, sehingga suatu saat anak-anak kita menjadi generasi-generasi penerus bangsa yang bisa diandalkan dan membawa citra negara kita menjadi negara yang lebih bermartabat di kancah internasional.

Kualitas suatu pendidikan dapat dilihat dari output yang dihasilkan, melalui proses belajar mengajar serta sarana dan prasarananya. Bukan hanya kesabaran dan keikhlasan yang harus lebih ditunjukkan oleh para pendidik, tetapi pendidikan nilai dan moral beragama dan penerapan budi pekerti luhur serta keteladanan pendidik/orang tua menampilkan akhlaq yang mulia harus lebih diintensifkan baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan sekolah sebagai lembaga formal pendidikan.

Melalui pendidikan yang berkualitas, kita berharap dapat menghasilkan sumber daya manusia yang handal, yang mampu memenangkan persaingan di kancah percaturan internasional menuju MEA 2015. Semua itu dapat kita raih jika kita memiliki komitmen untuk membekali sumber daya manusia itu dengan bekal pendidikan nilai dan moral yang diawali dari rumah dengan tidak meninggalkan nilai-nilai luhur yang terkandung dalam Pancasila, budaya yang melekat, dan nilai-nilai kebangsaan sebagai hasil dari perjuangan bangsa kita.

#### **SARAN-SARAN**

Sasaran pengembangan kebudayaan yang berlandaskan pada nilai-nilai luhur adalah: (1) adanya pelatihan secara periodik kepada guru/pendidik untuk mengaplikasikan pendidikan nilai dan moral beragama; (2) adanya penilaian terhadap perilaku anak didik yang mencerminkan karakter bangsa Indonesia; (3) adanya sarana dan prasarana yang memadai untuk memfasilitasi terbentuknya perilaku yang mencerminkan karakter (identitas nasional) bangsa kita.

#### **DAFTAR RUJUKAN**

Driscoll; Spares; Pinto, 2014, *95 Strategi Pengajaran*, Jakarta: PT Indeks

Elfiky, Ibrahim, 2014, *Terapi Berpikir Positif*, Jakarta: Zaman

[http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530239bfb1545/mpr--pilar-](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530239bfb1545/mpr--pilar-kebangsaan-tak-ubah-kedudukan-pancasila)

[kebangsaan-tak-ubah-kedudukan-pancasila](http://www.hukumonline.com/berita/baca/lt530239bfb1545/mpr--pilar-kebangsaan-tak-ubah-kedudukan-pancasila) diunduh Rabu, 14 Oktober 2015 jam 10.25 WIB

[http://www.empatpilarkebangsaan.web.id/blog/2014/02/03/pancasila-dan-](http://www.empatpilarkebangsaan.web.id/blog/2014/02/03/pancasila-dan-bhinneka-tunggal-ika-jati-diri-bangsa-Indonesia.html)

[bhinneka-tunggal-ika-jati-diri-bangsa-Indonesia.html](http://www.empatpilarkebangsaan.web.id/blog/2014/02/03/pancasila-dan-bhinneka-tunggal-ika-jati-diri-bangsa-Indonesia.html), diunduh Senin, 12 Oktober 2015 jam 11.15 WIB

[http://satuharapan.com/index.php?id=109&tx\\_ttnews\[tt\\_news\]=5687&cHash=1](http://satuharapan.com/index.php?id=109&tx_ttnews[tt_news]=5687&cHash=1)

Nurihsan, Juntika Ahmad, 2012, *Strategi Layanan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Refika Aditama).

-----, Undang-undang SPN No. 20/2003 Bab. II Pasal 3

<http://bitalyfiz.blogspot.co.id/2011/12/identitas-nasional-karakter-bangsa.html>,  
diunduh Senin, 12 Oktober 2015 jam 10.40 WIB

<http://krjogja.com/liputan-khusus/analisis/2078/menyongsong-masyarakat-ekonomi-asean-2015.kr>

<http://www.crmsindonesia.org/node/624>

<http://nasional.kontan.co.id/news/duh-indonesia-masih-minim-mencetak-pengusaha-muda>

<http://industri.kontan.co.id/news/inaca-minta-dukungan-di-bisnis-penerbangan-charter>

<http://industri.kontan.co.id/news/ekspor-produk-pertanian-terus-tumbuh/2014/03/28>

<http://nasional.kontan.co.id/news/hadapi-mea-sby-terbitkan-inpres-daya-saing>

<http://nasional.kontan.co.id/news/marie-tantangan-utama-mea-adalah-pendidikan/2014/08/28>

<https://saepudinonline.wordpress.com/2013/05/16/menakar-kesiapan-menghadapi-masyarakat-ekonomi-asean-2015/>

Jihad, Asep; Suyanto, 2013, *Menjadi Guru Profesional, Strategi Meningkatkan Kualifikasi dan Kualitas Guru di Era Global*, Jakarta: Erlangga

tabloid warta ekonomi edisi ke 19 bulan Oktober 2014

[www.KabarIndonesia.co.id](http://www.KabarIndonesia.co.id)

Yusuf, Syamsu; Nurihsan, Juntika, 2012. *Landasan Bimbingan & Konseling*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya Offset